

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Albert Napitupulu, Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis (Bogor: IPB Press, 2013).

Anis, Mohammad, 2012, "Menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan", Warta Majala Minerba, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Edisi XII April.

Anggaran, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung : Pustaka Setia.

Bagir Manan, 2005. Hukum Positif Indonesia, Bandung: Mandar Maju.

Bosko, Rafael Edy, 2006, Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam, Jakarta: Elsam

Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Fendri, Azmi. 2016. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara. Jakarta: Rajawali.

Fuad Nasar, "Ormas Keagamaan Benteng Keutuhan Bangsa," (April 27, 2023).

Hadjon, P. M. (2007). *Good Governance dalam Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.

Hamzah, E. S. (2020). Permasalahan Hukum Perizinan Usaha Pertambangan di Indonesia: Kajian Normatif dan Praktis. Yogyakarta: UII Press.

Hayati, Tri, Era Baru Hukum Pertambangan (Dibawah Rezim UU Nomor 4 Tahun 2009), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Heryanti, H., & Masulili, M. F. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2)

Kusuma, R. H. (2021). *Perizinan Usaha Pertambangan: Panduan Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Pustaka Bambu.

Lubis, M. Y. (2022). *Hukum Pertambangan Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Nandang Sudrajat. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017).

Redi, A. (2019). *Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan: Analisis Yuridis dan Implementasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).

Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sianitawati Sianitawati and Aries Heru Prasetyo, “Rancangan Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara Tahun 2023-2024

Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Surie, *Ilmu Administrasi Negara*, Gramedia, Jakarta, 1986.

Suranta, Ferry Aries, 2012, *Penggunaan Lahan Hak Ulayat Dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Gramata Publishing.

Suyatono dkk. 2003. *Good Mining Practice*. Jakarta: Mutiara Bumi.

B. JURNAL

Alfian, Ahmad Hijri, And Diyah Sekar Arum. “Akuntabilitas Sebagai Penerapan Good Corporate Governance Yang Mengurangi Potensi Kecurangan Pada Koperasi Syariah.” *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)* 15, No. 2 (June 19, 2023): 178–189.

Anggraini, Dewi, And Syaifuddin Islami. “Penerapan Good Mining Practice Pada Aktivitas Pertambangan Emas Di Sumatera Barat.” *Menara Ilmu* 17, No. 2 (July 28, 2023).

Anggun Sari Et Al., “Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”, *Jurnal Hukum Malahayati* 3, No. 1 (June 6, 2022).

Apriliano, Jordy. “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik Di Desa Lise” (February 5, 2022). Accessed April 7, 2025.

Ariadno, M. K. A. (2019). Prinsip-Prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 29(2).

Astinda, Afifudin Nur Rosyid, Wahyu Pujo Pratama, And Muhammad Bagus Haidar. “Konflik Regulasi Dan Masalah Kelayakan Pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Bagi Ormas Keagamaan.” *Jurnal Usm Law Review* 7, No. 3 (December 21, 2024): 1851. Accessed April 7, 2025. <https://Journals.Usm.Ac.Id/Index.Php/Julr/Article/View/10900>.

Ayuningrum, Imang Indah, And Tjiptohadi Sawarjuwono. “Harmonisasi Falsafah ‘Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo’ Dalam Penerapan Good Government Governance.” *Jurnal Proaksi* 10, No. 3 (September 6, 2023): 322–336.

Azfirmawarman, Dony, And Aldri Frinaldi. “Inovasi Budaya Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Pelayanan Publik.” *Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 22, No. 1 (June 26, 2024): 89–100. Accessed April 7, 2025.

Azizah, Amri Nur. “Legalitas Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Pt. Freeport Indonesia.” *Journal Publicuho* 3, No. 2 (May 21, 2020): 158.

Bernike, Geby, Devi Ervina Nusyamsiah, And Shannia Angelia Rahardjo. “Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Kepada Ormas Keagamaan Dalam Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.” *Padjadjaran Law Review* 12, No. 2 (December 7, 2024): 157–170. Accessed April 7, 2025.

Biky Uthbek Mubarak, "Problematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kabupaten Sleman)", *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Uneversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2015).

Durlista, Machillah Afany, And Ickhsanto Wahyudi. “Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social Dan Governance (Esg) Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Periode 2017-2022.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)* 7, No. 3 (September 9, 2023): 210–232.

Dwiputri, I., & Santoso, T. (2020), “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Good Governance: Studi Kasus di Pemerintahan Daerah”. *Jurnal Administrasi Publik*, 7.

Efendi, Nur, Aldri Frinaldi, Rembrandt, Dasman Lanin, Genius Umar, And Mulya Gusman. “Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (Jimnu)* 1, No. 3 (July 30, 2023): 123–128.

Ertanti, Indriana. “Konfigurasi Politik Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Produk Hukum Di Indonesia.” *Diversi : Jurnal Hukum* 7, No. 2 (December 15, 2021): 281.

Estefania, Estina Sativa, And Eva Noorliana. “Analisis Pertumbuhan Pdb Indonesia Melalui Pengembangan Sektor Pertambangan.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, No. 5 (May 21, 2021): 756–765.

Fitriyani, Reno, “Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi”, *Jurnal Redoks*, Vol 1, No. 1, Januari-Juni, 2016.

Hakeu, Febrianto, And Mohamad Steven Alim. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pencapaian Sdgs Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.” *Mohuyula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, No. 1 (June 30, 2024): 1.

Hamsinar, Hamsinar. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (Jpail)* 3, No. 4 (June 30, 2022): 85–90.

Hartana, Hartana. “Sejarah Hukum Pertambangan Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 5, No. 1 (February 17, 2019): 145.

Irawan, Angga Danu Fadil. “Dialektika Regulasi Pertambangan Pemerintah Indonesia Dan Pt Freeport Indonesia Melalui Pendekatan Obsolescing Bargaining Model.” *Padjadjaran Journal Of International Relations* 3, No. 1 (January 31, 2021): 49.

Januari, Achmad Haris. “Sistem Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Tata Kelola Pertambangan.” *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* Vol. 1, No. 2 (2015).

Kusnianti Sampulawa, And Avininda Dewi Nindiasari. “Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Alokasi

Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi.” *J-Ceki : Jurnal Cendekia Ilmiah* 2, No. 6 (July 2, 2023): 527–534.

La Ode Amri, La Ode Bariun, Winner A. Siregar, Hijriani, Suriani Bt Tolo, And La Ode Munawir. “Pengaruh Hukum Tumpang Tindih Di Areal Perkebunan Terhadap Izin Usaha Pertambangan Dari Perspektif Penerbitan Izin.” *Sultra Research Of Law* 6, No. 2 (October 12, 2024): 71–82. Accessed April 7, 2025.

Listiyani, Nurul. “Konsep Perizinan Terpadu Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsir Sektor Pertambangan.” *Lambung Mangkurat Law Journal* 3, No. 1 (March 22, 2018): 19.

Lumintang, Christo Viki. “Aspek Hukum Pemberian Izin Usaha Bisnis Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia.” *Lex Et Societatis* 8, No. 4 (October 20, 2020).

Maharani, Ivana Septia, And Fiola Nanda Saputri. “Karakteristik Spiritual Leadership Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.” *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu* 7, No. 1 (February 15, 2025): 1–11. Accessed April 7, 2025.

Malau, Suryani. “Analisis Sikap Gereja Hkbp Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.” *Collecta: Journal Of Theology And Christian Tradition* 2, No. 1 (March 30, 2025): 81–102. Accessed April 7, 2025.

Manullang, Herna Rosalin, Robiana Modjo, And Alex Sander Lumban Gaol. “Implementasi Pencegahan Dan Pengendalian Penularan Virus Sar-Cov-2 Pada Kegiatan Pertambangan Di Indonesia.” *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 6, No. 1 (January 4, 2022): 244–250.

Marilang, 2011, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang” *Jurnal Al-Risalah* Volume 11 Nomor 1 Mei.

Maulana, M. R., & Firmansyah, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11- 16.

Muhammad Agus Fajar Syaefudin, And Fajar Ari Sudewo. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Ilegal Di Kota Cirebon.” *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (May 27, 2020): 108–124.

Muryati, Dewi Tuti, B. Rini Heryanti, And Dhian Indah Astanti. “Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan

Penyelesaian Sengketa Pertambangan.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, No. 1 (November 26, 2017): 23.

Nabilla Desyalika Putri Dan Dian Agung Wicaksono, Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat, Vol. 13, 1 Maret 2016.

Nugroho, Wahyu. “Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 4 (October 16, 2019): 402.

Nurlinda, I. (2020). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 1–9.

Pradiatmika, Putu Putra, Ida Ayu Putu Widiati, And Ni Made Sukaryati Karma. “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Daerah Pertambangan.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 2 (July 20, 2020): 252–257.

Pratiwi, Nadia Ayu, And Elsi Kartika Sari. “Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam (Emas) Di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.” *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti* 5, No. 2 (July 21, 2020): 65–70.

Prawira, Zain Yudha, Masruri Muchtar, And Pardomuan Robinson Sihombing. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Dan Pertambangan.” *Educoretax* 3, No. 2 (June 27, 2023): 103–113.

Purnamasari, Fatimah Wulan. “Good Zakat Governance: Adaptasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Lembaga Zakat.” *Ziswaf Asfa Journal* 2, No. 2 (October 31, 2024): 181–195. Accessed April 7, 2025.

Puspitasari, Condrodewi, Sumarjono, Putera Perdana, And Juang Gagah Mardhika. “Pola Relasi Pemerintahan Desa.” *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)* 3, No. 1 (June 30, 2022): 17–34.

Rachman, Sri Nurnaningsih, And Melki T. Tunggati. “Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.” *The Juris* 8, No. 1 (June 30, 2024): 349–365. Accessed April 7, 2025.

Raharja, Bayu, Asgan Riza Nasrullah, And Satya Hadi Pamungkas. “Penyusunan Informasi Geospasial Tematik Sektor Pertambangan Yang Akurat Dalam Mendukung Kebijakan Satu Peta.” *Seminar Nasional Geomatika* (April 14, 2021): 805.

Redi, Ahmad, And Luthfi Marfungah. "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 4, No. 2 (November 21, 2021): 473–506.

Rusyuniardi, Clara C. M. U. "Kekuatan Mengikat Izin Usaha Pertambangan Dalam Hukum Pertambangan Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 8, No. 1 (May 18, 2020).

Satrya Pangadaran Marpaung, "Organisasi Kemasyarakatan Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia," *Law Review* Volume XV No. 1 (Juli 2015)

Simatupang, P. A., Pinangkaan, P. F., & Prasetyo, F. A. (2022). Upaya Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Mengatasi Praktik Pertambangan Batubara Ilegal. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 4(1).

Suciadi, Muhammad, Eko Priyo Purnomo, And Aulia Nur Kasiwi. "Eksternalitas Positif Tambang Batubara Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, No. 2 (August 31, 2020): 267.

Suman, Suman. "Determinan Struktur Modal Dan Nilai Perusahaan Pertambangan Pasca UU Nomor 4 Tahun 2009." *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 19, No. 1 (September 7, 2018).

Suryaningsih, Ayuk, Allena Marvelia Silalahi, And Aqila Herdinyanto Sanjaya. "Hak Penguasaan Negara Dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Sesuai Dengan UU Minerba." *Supremasi : Jurnal Hukum* 5, No. 2 (April 3, 2023): 144–158.

Sompotan, H. B. (2021). Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(7).

Taufiq, Muchamad. "Korelasi Pengelolaan Pertambangan Dengan Cita-Cita Negara Hukum Kesejahteraan." *Social : Jurnal Inovasi Pendidikan Ips* 4, No. 3 (October 12, 2024): 265–273. Accessed April 7, 2025. <https://jurnalp4i.com/index.php/social/article/view/3318>.

Tohir, M. (2018). Pertanggungjawaban Lembaga Negara dalam Pelaksanaan Good Governancesecara Yuridid dan Politis menurut Hukum. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 4 (1), 65-80

Warlina, L. (2019). Prinsip-prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan. *Journal Manajemen Pembangunan Dan Lingkungan*, 1(1), 1–38.

Widodo, Widi, I Nyoman Suandika, And Kadek Dedy Suryana. "Analisis Hukum Terhadap Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr)

Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah.” *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 3, No. 2 (November 25, 2023): 42–47.

Wulandari, Rika Putri, And Muhammad Helmi Fahrozi. “Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, No. 1 (January 27, 2021): 191–206.

Zainal, Muh. “Reformasi Pelayanan Publik Menuju Good Governance” (May 5, 2022). Accessed April 7, 2025.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

D. SUMBER LAIN

- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Risalah Rapat Kerja Komisi VII DPR RI DENGAN Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI, Kamis 31 Agustus 2023
- Draft Kronologis Proses Penyusunan Hingga Pembahasan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

